

Forming process, pattern and the need for intergovernmental management in indonesia

Hardi Warsono, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20448324&lokasi=lokal>

Abstrak

Abstract. Cooperation among neighbouring region is commonly termed regional cooperation. Inter-region cooperation in the study of public administration is categorized as public management especially intergovernmental management. Inter-region cooperation in Indonesia has been for a long time trying to find its form. However, in the middle of its process, the implementer is trapped in doubt. The paper aims to trace the institutional form and its problem in the neighbouring region cooperation. The research is done through literature study, observation on inter-region cooperation especially in the central Java and some facilitation done by the writer in the several regions in Indonesia. There are two forms of referred institution which is developed on the basis of this networking pattern; they are intergovernmental relation (IGR) and intergovernmental management (IGM). In the mean time, the governmental support on inter-region cooperation which is supposed to form collaboration is hampered by the inconsistency of regulation which is issued by several parties (ministries) in the central government.

Abstrak. Kerjasama antar daerah yang berdekatan biasa disebut kerjasama regional. Kerjasama antar daerah dalam kajian administrasi publik masuk dalam kategori manajemen publik, khususnya intergovernmental management. Kerjasama antar daerah di Indonesia, telah lama mencari bentuk, namun dalam perjalanannya terjebak pada keraguan para pelaksananya. Tulisan ini bertujuan merunut bentuk kelembagaan dan permasalahannya dalam kerjasama antar daerah yang berdekatan. Tulisan ini dikembangkan dari kajian literature, pengamatan pada praktek kerjasama antar daerah khususnya di Jawa tengah dan fasilitasi yang dilakukan oleh penulis di beberapa daerah di Indonesia. Terdapat dua bentuk kelembagaan rujukan yang dikembangkan atas dasar pola networking ini, adalah Intergovermental relation (IGR) dan intergovernmental management (IGM). Sementara itu, dorongan pemerintah untuk kerjasama antar daerah yang mestinya membentuk kolaborasi terhambat sendiri oleh inkonsistensi kebijakan yang dikeluarkan oleh berbagai pihak (kementerian) di pemerintah pusat.